

**LEMBARAN DAERAH**

**KOTA SEMARANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2004 SERI A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KOTA SEMARANG**

**TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b bahwa hasil perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Tahun 3839) ;

6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848) ;
7. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. [Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. [Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 ;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 637.999.643.770,-	
b. Belanja	Rp. <u>632.113.680.711,-</u>	
Surplus		Rp. 5.885.963.059,-
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 105.562.615.335,-	
- Pengeluaran	Rp. 31.774.065.000,-	
Surplus		<u>Rp. 73.788.550.335,-</u>
Jumlah		Rp. 79.674.513.394,-

**Pasal 2**

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 42.423.092.770,- dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 595.576.551.000,-        |
| b. Realisasi                             | Rp. <u>637.999.643.770,-</u> |

Lebih realisasi Rp. 42.423.092.770,-

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 86.939.339.289,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 719.053.020.000,-
b. Realisasi	Rp. <u>632.113.680.711,-</u>
Penghematan	Rp. 86.939.339.289,-

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/devisit sejumlah Rp. 117.590.505.941,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Devisit setelah perubahan	Rp. (123.476.469.000,-)
b. Realisasi surplus	Rp. <u>5.885.963.059,-</u>
Selisih lebih	Rp. 117.590.505.941,-

(4) Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2003 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan	Rp. 155.796.409.000,-
2) Realisasi	Rp. <u>105.562.615.335,-</u>
Selisih kurang	Rp. 50.233.793.665,-

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan	Rp. 32.319.940.000,-
2) Realisasi	Rp. <u>31.774.065.000,-</u>
Penghematan	Rp. 545.875.000,-

### **Pasal 3**

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 3.079.502.771.644,-
b. Jumlah Utang	Rp. 108.072.379.392,-
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 2.861.073.752.144,-

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 79.679.364.584,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp. 70.572.675.335,-	
b. Jumlah penerimaan kas	Rp. 672.989.583.770,-	
c. Kas di tangan dinas	Rp. <u>4.851.190,-</u>	
Jml Total Penerimaan Kas		743.567.110.295,-
d. Jumlah pengeluaran kas		<u>663.887.745.711,-</u>
e. Saldo Kas 31 Des 2003		<u>79.679.364.584,-</u>

#### **Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

#### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 3 April 2004  
**WALIKOTA SEMARANG**  
ttd  
**H. SUKAWI SUTARIP**

**Lampiran**

# ALIRAN KAS PERIODE 31 DESEMBER 2003

## 1. ALIRAN KAS AKTIVITAS OPERASI

### a. Aliran Kas Masuk

1. PAD	Rp	143.157.296.082	
2. Dana Alokasi Umum	Rp	308.710.000.000	
3. Bagi Hasil Pajak	Rp	144.940.208.592	
4. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	Rp	2.163.503.394	
5. Lain-lain Pendapatan	Rp	39.028.635.702	+
Jumlah Arus Kas Masuk			Rp 637.999.643.770

### b. Aliran Kas Keluar

1. Belanja Administrasi & Umum	Rp	375.674.811.826	
2. Belanja Operasional & Pemel. (O & M)	Rp	70.749.313.376	
3. Belanja Transfer	Rp	94.179.013.527	
4. Belanja Tidak Tersangka	Rp	3.543.778.488	
5. Belanja Angsuran Bunga	Rp	6.900.016.099	+
			Rp 551.046.933.316
			Rp 86.952.710.454

## SURPLUS ALIRAN KAS BERSIH OPERASI

## 2. ALIRAN KAS AKTIVITAS INVESTASI

### Aliran Kas Keluar

Belanja Investasi	Rp	81.066.747.395	
Bantuan Modal	Rp	730.000.000	+
			Rp 81.796.747.395
			Rp 5.155.963.059

## 3. ALIRAN KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN

### a. Aliran Kas Masuk

Penerimaan Pinjaman	Rp	21.000.000.000	
Transfer dari Dana Cadangan	Rp	13.989.940.000	+
	Rp	34.989.940.000	

### b. Aliran Kas Keluar

Biaya Angsuran Hutang	Rp	17.054.125.000	
Transfer ke Dana Cadangan	Rp	13.989.940.000	+
	Rp	31.044.065.000	

## SURPLUS ALIRAN KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN (a - b)

Rp 3.945.875.000 +

## KENAIKAN BERSIH KAS

Saldo per 1 Januari 2003	Rp	9.101.838.059	
Kas di Tangan Dinas	Rp	70.572.675.335	
	Rp	4.851.190	+
Saldo Kas Akhir	Rp	79.679.364.584	

WALIKOTA SEMARANG  
 ttd  
 H. SUKAWI SUTARIP

PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
 NERACA  
 PER 31 DESEMBER 2003

AKTIVA

<b>Aktiva Lancar</b>				<b>Hutang</b>			
- Kas	Rp.	1.313.516.681		- Hutang Jangka Pendek	Rp.	315.772.893	
- Bank	Rp.	41.965.847.903		- Hutang Jangka Panjang	Rp.	107.756.606.499	
- Deposito	Rp.	36.400.000.000					Rp. 108.072.379
- Uang Muka	Rp.	161.425.425					
- Persediaan	Rp.	963.875.805					
- Piutang	Rp.	1.624.691.260					
			Rp. 82.429.357.074				
<b>INVESTASI</b>							
			Rp. 28.916.906.605	<b>Surplus</b>			Rp. 96.366.700
				<b>Dana Cadangan</b>			Rp. 13.989.940
<b>Aktiva Tetap</b>							
- Tanah	Rp.	1.262.144.992.539					
- Bangunan	Rp.	488.801.648.362					
- Jalan, Jembatan & Infrastruktur	Rp.	510.949.444.513					
- Kendaraan	Rp.	652.006.311.748		<b>Ekuitas</b>			Rp. 2.851.073.752
- Peralatan Kantor	Rp.	39.509.719.815					
- Inventaris & Barang lainnya	Rp.	14.744.390.988					
			Rp. 2.968.156.507.965				

<b>Hutang</b>			
- Hutang Jangka Pendek	Rp.	315.772.893	
- Hutang Jangka Panjang	Rp.	107.756.606.499	
			Rp. 108.072.379.392
<b>Surplus</b>			Rp. 96.366.700.000
<b>Dana Cadangan</b>			Rp. 13.989.940.000
<b>Ekuitas</b>			Rp. 2.851.073.752.000

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG**  
**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2003**

NO	URAIAN	PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2003	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1</b>	<b>BAG. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>129.808.802.000,00</b>	<b>143.157.296.082,00</b>	<b>13.348.494.082,00</b>	<b>10,28%</b>
	a. Pos Pajak Daerah	74.028.836.000,00	82.476.480.769,00	8.448.644.769,00	11,41%
	b. Pos Retribusi Daerah	38.380.833.000,00	41.618.312.640,00	3.237.479.640,00	8,44%
	c. Pos Bagian Laba BUMD	270.109.000,00	270.109.575,00	575,00	0,00%
	d. Pos Lain-lain PAD yg sah	17.131.024.000,00	18.792.393.098,00	1.661.369.098,00	9,70%
<b>2</b>	<b>BAG. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>426.590.964.000,00</b>	<b>455.813.711.986,00</b>	<b>29.222.747.986,00</b>	<b>6,85%</b>
	a. Pos Bagi Hasil Pajak	116.522.604.000,00	144.940.208.592,00	28.417.604.592,00	24,39%
	b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1.358.380.000,00	2.163.503.394,00	805.143.394,00	59,27%
	c. Pos Dana Alokasi Umum	308.710.000.000,00	308.710.000.000,00	-	0,00%
<b>3</b>	<b>BAG. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>39.176.785.000,00</b>	<b>39.028.635.702,00</b>	<b>(148.149.298,00)</b>	<b>-0,38%</b>
	a. Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	39.176.785.000,00	39.028.635.702,00	(148.149.298,00)	-0,38%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>595.576.551.000,00</b>	<b>637.999.643.770,00</b>	<b>42.423.092.770,00</b>	<b>7,12%</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>1</b>	<b>BELANJA APARATUR DAERAH</b>	<b>270.551.410.000,00</b>	<b>260.190.961.266,00</b>	<b>10.360.448.734,00</b>	<b>3,83%</b>
	<b>A. BELANJA ADM. UMUM</b>	<b>132.436.209.000,00</b>	<b>124.803.028.520,00</b>	<b>7.633.180.480,00</b>	<b>5,76%</b>
	a. Belanja Pegawai	110.876.435.000,00	104.823.378.646,00	6.053.056.354,00	5,46%
	b. Belanja Barang & Jasa	13.739.324.000,00	12.462.232.452,00	1.277.091.548,00	9,30%
	c. Belanja Pemeliharaan	4.754.894.000,00	4.716.177.792,00	38.716.208,00	0,81%
	d. Belanja Perjalanan Dinas	3.065.556.000,00	2.801.239.630,00	264.316.370,00	8,62%
	<b>B. BELANJA OPR. &amp; PEMEL.</b>	<b>16.692.915.000,00</b>	<b>16.245.814.782,00</b>	<b>447.100.218,00</b>	<b>2,66%</b>
	<b>C. BELANJA MODAL</b>	<b>45.850.432.000,00</b>	<b>45.675.983.387,00</b>	<b>174.448.613,00</b>	<b>0,38%</b>
	<b>D. BELANJA TRANSFER</b>	<b>75.571.854.000,00</b>	<b>73.466.134.577,00</b>	<b>2.105.719.423,00</b>	<b>2,79%</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>436.585.869.000,00</b>	<b>361.478.924.858,00</b>	<b>75.106.944.142,00</b>	<b>17,20%</b>
	<b>A. BELANJA ADM.UMUM</b>	<b>256.623.230.000,00</b>	<b>250.871.783.306,00</b>	<b>5.751.446.694,00</b>	<b>2,24%</b>
	a. Belanja Pegawai	244.043.733.000,00	238.776.084.105,00	5.267.648.895,00	2,16%
	b. Belanja Barang & Jasa	9.946.838.000,00	9.623.537.751,00	323.300.249,00	3,25%
	c. Belanja Pemeliharaan	2.291.681.000,00	2.134.465.850,00	157.215.150,00	6,86%
	d. Belanja Perjalanan Dinas	340.978.000,00	337.695.600,00	3.282.400,00	0,96%
	<b>B. BELANJA OPR &amp; PEMEL</b>	<b>55.392.563.000,00</b>	<b>54.503.498.594,00</b>	<b>889.064.406,00</b>	<b>1,61%</b>
	<b>C. BELANJA MODAL</b>	<b>103.854.691.000,00</b>	<b>35.390.764.008,00</b>	<b>68.463.926.992,00</b>	<b>65,92%</b>
	<b>D. BELANJA TRANSFER</b>	<b>20.715.385.000,00</b>	<b>20.712.878.950,00</b>	<b>2.506.050,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>	<b>4.515.741.000,00</b>	<b>3.543.778.488,00</b>	<b>971.962.512,00</b>	<b>21,52%</b>
<b>4</b>	<b>BELANJA HUTANG</b>	<b>7.400.000.000,00</b>	<b>6.900.016.099,00</b>	<b>499.983.901,00</b>	<b>6,76%</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>719.053.020.000,00</b>	<b>632.113.680.711,00</b>	<b>86.939.339.289,00</b>	<b>12,09%</b>
	<b>SURPLUS</b>	<b>(123.476.469.000,00)</b>	<b>5.885.963.059,00</b>	<b>(129.362.432.059,00)</b>	<b>104,77%</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>155.796.409.000,00</b>	<b>105.562.615.335,00</b>	<b>(50.233.793.665,00)</b>	<b>-32,24%</b>
	a. Sisa Lebih Tahun Lalu	70.572.409.000,00	70.572.675.335,00	266.335,00	-
	b. Utang pada Pihak ke-3	85.224.000.000,00	21.000.000.000,00	(64.224.000.000,00)	-75,36%
	c. Transfer dari dana cadangan	-	13.989.940.000,00	-	-
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.319.940.000,00</b>	<b>31.774.065.000,00</b>	<b>545.875.000,00</b>	<b>1,69%</b>
	a. Angsuran Hutang	17.600.000.000,00	17.054.125.000,00	545.875.000,00	3,10%
	b. Bantuan Modal	730.000.000,00	730.000.000,00	-	-
	c. Transfer ke Dana Cdangan	13.989.940.000,00	13.989.940.000,00	-	-
<b>3</b>	<b>SURPLUS PEMBIAYAAN (C1 - C2)</b>	<b>123.476.469.000,00</b>	<b>73.788.550.335,00</b>	<b>49.687.918.665,00</b>	<b>40,24%</b>